

PENERAPAN SANKSI PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI AL
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
(Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH

ZURAHIM

1121211044



Pembimbing :

1. Prof. Dr. Elwi Danil, SH., M.H
2. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

**PENERAPAN SANKSI PEMECATAN TERHADAP PRAJURIT TNI AL
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI**
(Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang)
(Zurahim, 1121211044, Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Halaman 119, 2016)

ABSTRAK

Pidana tambahan pemecatan/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas militer bagi seorang prajurit hanya diatur dalam KUHPM. Dilihat dari perspektif hukum pidana, KUHPM merupakan hukum pidana khusus, karena KUHPM dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu. Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (militer) termasuk didalamnya tindak pidana desersi yang merupakan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan dalam tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya, sementara seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada menjalankan tugasnya. Kewenangan pemecatan dari dinas militer merupakan kewenangan hakim militer maupun kesatuan TNI AL sehingga duplikasi kewenangan tersebut dalam prakteknya berpotensi terjadi benturan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: *Pertama*: Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI AL? *kedua*, Bagaimanakah proses penerapan sanksi pemecatan bagi prajurit TNI AL yang melakukan tindak pidana desersi? dan *ketiga*, Bagaimanakah menentukan sanksi yang akan diterapkan terhadap Prajurit TNI AL dalam tindak pidana desersi bila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan dengan putusan pengadilan militer? Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Wawancara dilakukan sebagai data-data pendukung untuk memperkuat argumentasi-argumentasi dan pemikiran-pemikiran dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini, proses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana dan penyelesaian secara administrasi di kesatuan melalui sidang tabiat secara *In Absensia*. Penerapan Sanksi pemecatan/PTDH dari Dinas Militer terhadap prajurit TNI AL tindak pidana desersi dapat melalui saluran hukum administrasi prajurit TNI AL karena mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan dan melalui proses peradilan pidana setelah mendapat putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terjadi perbedaan antara sanksi administrasi dari kesatuan berupa pemecatan/PTDH dari dinas militer dengan putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap maka sanksi yang akan diterapkan adalah sanksi administrasi berupa pemecatan/PTDH dari dinas militer melalui mekanisme Sidang Tim Peneliti Tabiat. Diharapkan kepada institusi TNI AL (Lantamal II Padang) dalam mencegah tindak pidana desersi yang berakibat pemecatan/PTDH perlu ditingkatkan intensitas penyuluhan hukum kepada prajurit TNI AL tentang dampak dilakukan tindak pidana desersi baik dampak terhadap

organisasi TNI AL, terhadap prajurit yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan antara sanksi administrasi berupa PTDH dari kesatuan dengan putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap, maka Keputusan PTDH dari kesatuan diharapkan menunggu putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap tentunya dengan merubah peraturan yang memungkinkan pemecatan desertir sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Kata Kunci: Sanksi, Pemecatan, Desertir.



APPLICATION OF DISMISSAL PUNISHMENT TO THE INDONESIAN NAVY SOLDIER WHO DID DESERTION CRIMINAL OFFENSE

(Study at Military Court Territory I-03 Padang)

(Zurahim, 1121211044, Postgraduate Law Faculty of Andalas University, Page 119, 2016)

ABSTRACT

The Addition criminal of no respect dismissal (PTDH) from The military service for a soldier is arranged only in KUHPM. Law Crime perspective point of view, KUHPM is special law crime, because KUHPM was made and be valid for specific people. It means that law crime regulate something that only can do by specific people (military) including desertion criminal offense which mean the military personel leave their unit in unoccupied at least 30 days in a row, or pull out for good. On the other side, a military personel strive for readiness where they should be posted. The authority of dismissal from military service is military jugde's authority and the Indonesian Navy service, so that the duplication authority practically made a potential collision. The problem that we talk in this research are : The first, How is the solving process of desertion criminal offense in the Indonesian Navy Service ? The second, How is application process of dismissal punishment for Indonesian Navy soldier who did the desertion criminal offense ? And The third, How to determine the punishment that will applied to the Indonesian Navy soldier in Desertion Criminal Offense if there is a difference between administration punishment from the service with the military court decision. The method that used in this research is sociologic juridical, that is the research which use literature materials on secondary data as the initially data and continued with primary data as supporting data to strengthen the argumentation and thought in this research. In the mean while the character of the research is deskriptive with qualitative analysis. In conclusion of this research, solving process of Desertion Criminal Offense who did by Indonesian Navy soldier can be through criminal justice process and the administration completion in the unit through in absention behavior council. Punishment application of dismissal with no respect/PTDH from the military service to the Indonesian Navy desertion criminal offense can be through Indonesian Navy soldier's administration law's channel, because it has obvious behavior that could harm the soldier's discipline and through the criminal justice process after the military court descission with magnitude fixed law. If there is any differences between administration punishment from the unit of no respect dismissal/PTDH with the military court decession by magnitude fixed law, then the punishment that will be applied is administration punishment that is no respect dismissal/PTDH from the military service through the behavior researches team council mechanism. Hopefully to the Indonesian Navy institution (2nd Main Naval Base Padang) to prevent the desertion criminal offense which result to no respect dismissal, it is need to befeed the intensity of law counseling for the Indonesian Navy soldier about the effect of dismissal criminal offense for the the Indonesian Navy organization, their family and themselves. To anticipate the difference between administration punishment from the unit with the military court decision with magnitude fixed law, so the no respect dismissal decision from the unit is expected to wait the

military court decision with magnitude fixed law and of course by changing the rule that enable desertir dismissal before the military court decicion with magnitude fixed law.

Keyword : Punishment, Dismissal, Desertion.

